



RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN

2021-2026

KABUPATEN LUWU TIMUR



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Soekarno – Hatta, Malili 92981 Telepon/Faks: (0474) 321429
Email : dishubluwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NOMOR : TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021-2026

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2021-2026 di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas pokok Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yang merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur

KEDUA : RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai sistematika sebagai berikut:

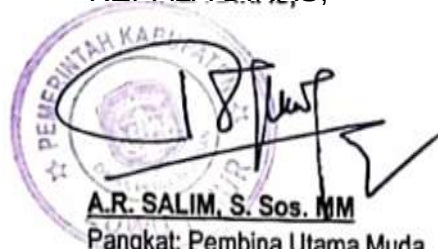
1. Bab I Pendahuluan;
2. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
3. Bab III Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah ;

4. Bab IV Tujuan Dan Sasaran;
5. Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan;
6. Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan;
7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
8. Bab VIII Penutup

KETIGA : Isi dan uraian RENSTRA Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal Januari 2024
KEPALA DINAS,



A.R. SALIM, S. Sos. MM
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 196511051987031015

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Urusan Perhubungan Tahun 2021-2026 yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan Sektor Perhubungan. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat. Sejalan dengan review internal terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Dinas Perhubungan terdahulu, maka dilakukan perbaikan agar Renstra Dinas Perhubungan dapat sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur.

Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran. Renstra 2016-2021 ini merupakan proses pembangunan 5 tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada Urusan Perhubungan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan.

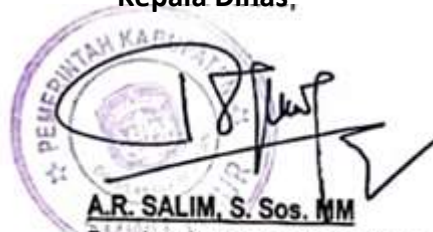
Penyusunan Renstra ini didasarkan kepada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.
2. Renstra Dinas Perhubungan terdahulu.
3. Cascading Kinerja Dinas Perhubungan sebagai salah satu hasil review internal.
4. Serta Dokumen pendukung lainnya.

Semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016–2021 ini menjadikan arah proses pembangunan di bidang Perhubungan di Kabupaten Luwu Timur lebih terarah.

Malili, Januari 2024

Kepala Dinas,



A.R. SALIM, S. Sos. MM
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 196511051987031015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	Hal 1
2. Landasan Hukum	Hal 2
3. Maksud dan Tujuan	Hal 3
4. Sistematika Penulisan	Hal 4
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Perangkat PD	Hal 9
2. Sumber Daya PD	Hal 12
3. Kinerja Pelayanan PD	Hal 13
4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	Hal 33
 BAB III PERMASALAHAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
1. Penentuan Isu-Isu Strategis	Hal 38
2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Hal 41
3. Telaah Visi, Misi, dan Program kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih	Hal 43
4. Telaah RENSTRA kementrian Perhubungan dan RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi	Hal 45
5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup	Hal 49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	Hal 52
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	Hal 58
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	Hal 60
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	Hal 89
BAB VIII PENUTUP	Hal 92

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan hal yang sangat diperlukan untuk memajukan suatu bangsa dan menilai berhasilnya suatu pemerintahan. Untuk menjalankan pembangunan tersebut sangatlah diperlukan perencanaan yang menurut ilmu manajemen diartikan sebagai suatu proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan dalam suatu organisasi merupakan suatu proses awal yang saling berkaitan dengan proses-proses berikutnya karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain [pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan] tidak akan dapat berjalan.

Rencana Strategis PD yang selanjutnya disingkat RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 Tahun. Penyusunan RENSTRA merupakan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional dimana disebutkan bahwa Penyusunan RENSTRA berpedoman kepada rencana Strategis [RENSTRA] PD dan mengacu kepada RPJMD, memuat kebijakan, Program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RENSTRA mempunyai fungsi penting dalam system perencanaan daerah, karena RENSTRA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah [RPJMD]. RENSTRA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan lebih konkrit dan terukur.

RENSTRA PD merupakan perencanaan 5 tahun yang mengacu pada RPJMD kabupaten yang memuat tentang Strategi dan kebijakan yang tertuang dalam program dan kegiatan prioritas seperti yang tertuang dalam rancangan awal RPJMD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan RENSTRA Tahun 2021-2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Adalah Sebagai Berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan Restribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 .
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas pokok Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan kabupaten Luwu Timur dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur pelaksanaan program kerja Dinas Perhubungan selama 5 (Lima) tahun kedepan. Dengan demikian penyusunan RENSTRA ini menjadi landasan penyusunan semua dokumen

operasional perencanaan pembangunan sector Perhubungan di Kabupaten Luwu Timur.

Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah Sebagai Berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan Prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, Sehingga tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan [Stakeholders] tentang rencana pembangunan tiap tahun;
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
5. Memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perhubungan kabupaten Luwu Timur dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur periode 2021-2026;

1.4 Sistematika Penulisan

BAB 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/kota, dan dengan RENSTRA PD;

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD;

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD;

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi Dokumen;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran [tugas dan fungsi] Dinas Perhubungan kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RENSTRA Dinas perhubungan kabupaten Luwu Timur periode sebelumnya, mengemukakan capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RENSTRA Dinas Perhubungan kabupaten Luwu Timur Periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui RENSTRA ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur PD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan kabupaten Luwu Timur, struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi;

2.2 Sumber Daya PD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dalam menjelaskan Tugas dan Fungsinya;

2.3 Kinerja Pelayanan PD

Bagian ini menunjukkan tingkat pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur berdasarkan sasaran atau target RENSTRA periode sebelumnya.

2.4 Tantangan & Peluang Pengembangan pelayanan PD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap RENSTRA kementerian perhubungan dan RENSTRA dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, hasil Telaah terhadap RT RW ,dan Hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan dinas Perhubungan kabupaten Luwu Timur pada Lima Tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan layanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada bagian ini di kemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan di Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih bagian ini mengemukakan Telaah terhadap Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaah RENSTRA kementerian Perhubungan dan RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Telaah RENSTRA kementerian perhubungan dan RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi selatan ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan Sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur terhadap sasaran RENSTRA K/L dan RENSTRA PD provinsi tersebut.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup
Strategis Telaah rencana tata ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. Di bandingkan dengan struktur dan pola ruang system maka PD dapat Mengidentifikasi arah [Geografis] pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD lima tahun mendatang. Di kaitkan dengan indikasi program memanfaatkan ruang jangka menengah dalam RT RW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya dengan sesuai TR RW tersebut. Sedangkan kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya di singkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi besar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana dan/ atau Program.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah Kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi Isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi PD diperoleh baik berasal dari analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi PD di masa lima tahun mendatang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur,

pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan kabupaten Luwu Timur beserta indikator kinerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan kabupaten Luwu Timur dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif [perumusan rencana program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur.

2.1.1. Tugas dan Fungsi Organisasi

Bidang dan kewenangan Dinas Perhubungan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

a. Tugas

Tugas pokok Dinas Perhubungan adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

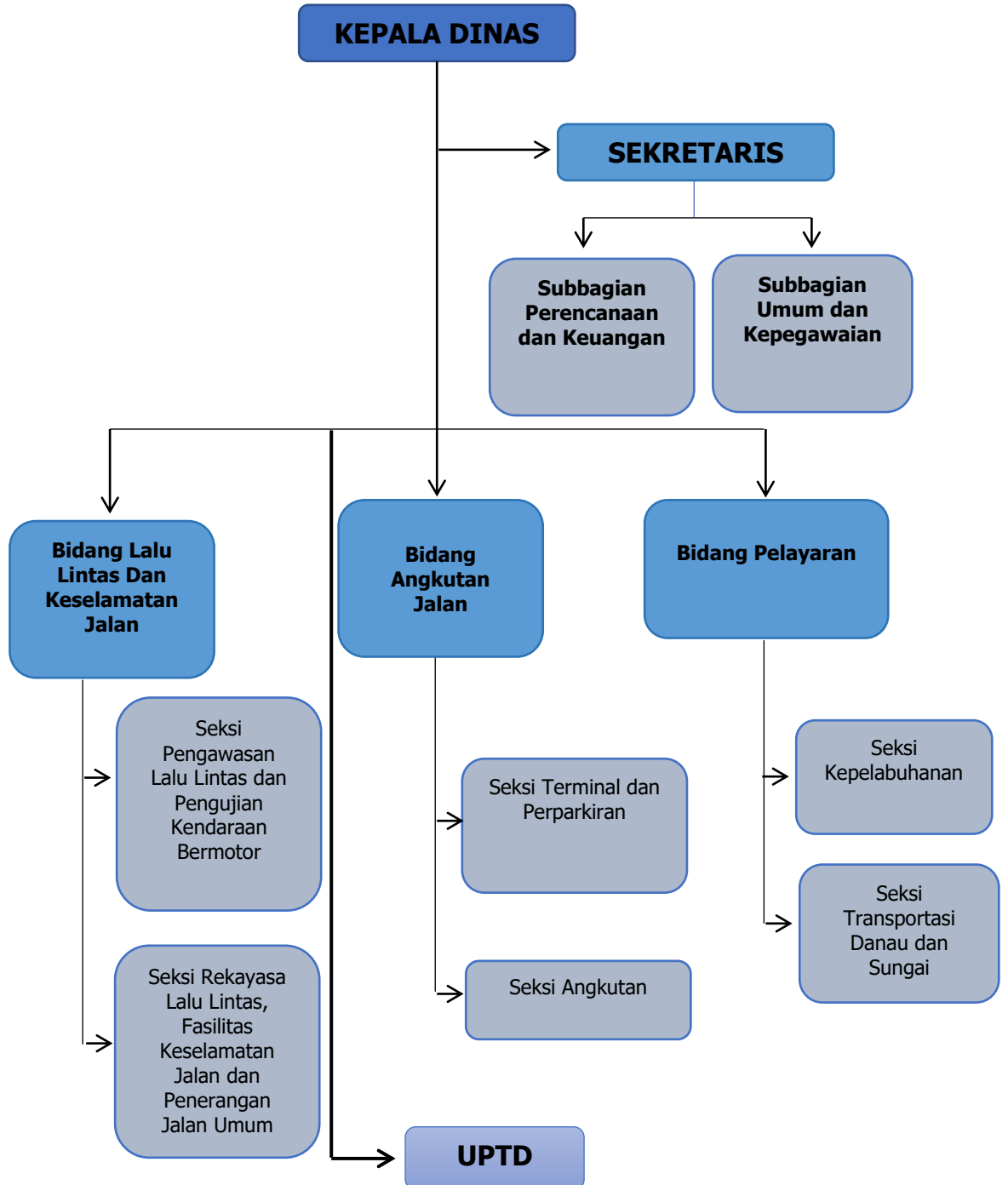
- 1) perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan;
- 2) perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Angkutan Jalan;
- 3) perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pelayaran;
- 4) perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- 5) pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan maka susunan organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Lalu Lintas Dan Keselamatan Jalan, terdiri atas :
Seksi Pengawasan Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan Bermotor ; dan
Seksi Rekayasa Lalu Lintas, Fasilitas Keselamatan Jalan dan Penerangan Jalan Umum.
- d. Bidang Angkutan Jalan, terdiri atas :
Seksi Terminal dan Perpajakan;
Seksi Angkutan.
- e. Bidang Pelayaran, terdiri atas :
Seksi Kepelabuhanan; dan
Seksi Transportasi Danau dan Sungai.
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Perhubungan



2.2 Sumber Daya PD

Dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana yang terurai sesuai dengan susunan organisasi diatas, pada Dinas Perhubungan memiliki pegawai sejumlah 25 orang . Jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat, golongan dan jabatan dapat lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Daftar Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan													Jumlah (org)
		IV.c	IV.b	IV.a	III.d	III.c	III.b	III.a	II.d	II.c	II.b	II.a	I.d	I.c	
1.	Kepala Dinas	1													1
2.	Sekretariat		1		1		1	1		1	1				6
3.	Bidang Hubdat			1		3		2	4						10
4.	Bidang Hublautud			1	1		1	2							5
5.	Bidang ASDP			1		1				1					3
	Jumlah	1	1	3	2	4	2	5	4	2	1				25

Tabel 2.2
Daftar Pegawai Berdasarkan Eselon

No.	Unit Kerja	Eselon						Jumlah (org)
		II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V	
1.	Kepala Dinas	1						1
2.	Sekretariat		1		2			3
3.	Bidang Hubdat			1	2			3
4.	Bidang Hublautud			1	2			3
5.	Bidang ASDP			1	1			2
	Jumlah	1	1	3	7			12

Tabel 2.3
Daftar Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No .	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan							Jumlah (org)
		S2	S1	DIII	DII	SMA	SMP	SD	
1.	Kepala Dinas	1							1
2.	Sekretariat	1	3		1	1			6
3.	Bidang Hubdat		5			5			10
4.	Bidang Hublautud		5						5
5.	Bidang ASDP		2			1			3
	Jumlah	2	15		1	7			25

2.3 Kinerja pelayanan PD

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur selama periode tahun 2016 sampai 2020 ditunjukkan pada tabel 2.4 tentang Review Pencapaian Kinerja Pelayanan PD dan Tabel 2.5 tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD

Pada tabel 2.4 capaian Indikator kinerja urusan Perhubungan dan pada tabel 2.5 ditampilkan pagu anggaran dan realisasinya selama kurun 5 tahun (2016 – 2020). Di sektor belanja secara umum capaian anggaran hampir mencapai 100%.

Tabel 2.4
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Perhubungan Tahun 2016 - 2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD 2016	TARGET					Kondisi Akhir Kinerja Awal Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggung Jawab	Realisasi				
				2016	2017	2018	2019	2020			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT														
A.	Perhubungan														
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	org	259,867	259,867	273,615	286,503	300,828	315,869	315,869	DISHUB	259,867	273,615	300,227	376,958	253,796
2	Rasio ijin trayek	%	0.050%	0.050%	0.007%	0.014%	0.015%	0.016%	0.016%	DISHUB	0.050%	0.007%	0.009%	0.014%	0.011%
3	Jumlah uji kir angkutan umum	kendaraan	2,022	2,022	2,097	2,576	2,640	2,640	2,640	DISHUB	2,022	2,097	2,302	2,405	2640
4	Jumlah pelabuhan laut/udara / terminal bus									DISHUB					
	a. Pelabuhan laut	unit	3	3	3	0	0	0	3		3	3	3	3	3
	b. Dermaga	unit	7	7	7	0	1	0	8		7	7	7	7	7

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD 2016	TARGET					Kondisi Akhir Kinerja Awal Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggung Jawab	Realisasi				
				2016	2017	2018	2019	2020			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	c. Bandar udara	unit	1	1	1	0	0	0	1		1	1	1	1	1
	d. Terminal bis	unit	2	2	2	0	0	0	2		2	2	3	3	3
5	Persentase layanan angkutan darat	%	2.160%	2.160%	2.074%	2.074%	2.074%	2.074%	2.074%	DISHUB	2.160%	2.074%	1.83%	0.96%	1.01%
6	Angkutan darat	unit	2423	2423	2442	2564	2692	2827	2827	DISHUB	2423	2442	2576	2650	2807
7	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	%	16.55%	16.55%	14.13%	14.17%	14.17%	13.56%	13.56%	DISHUB	16.55%	14.13%	10.64%	9.25%	9.25%
8	Pemasangan Rambu - rambu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	DISHUB	100%	100%	100%	100%	
	a. Marka (meter)	meter	18900	18900	5500	2200	0	2200	2200		18900	5500	2200		
	b. Rambu (Batang)	btg	150	150	36	120	0	120	120		150	36	120		
	c. Traffic light (set)	set	0	0	0	0	1	0	0		0	0		1	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD 2016	TARGET					Kondisi Akhir Kinerja Awal Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggung Jawab	Realisasi				
				2016	2017	2018	2019	2020			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	d. Warning Light (buah)	buah	0	0	0	2	0	0	0		0	0	2		
	e. RPPJ (buah)	buah	19	19	0	0	0	15	15		19	0			
	f. Guardrail (meter)	meter	140	140	0	0	30	50	50		140	0			
	h. Deliniator (buah)	buah	100	100	0	0	0	100	100		100	0			
	g. Road stud (paku jalan) (buah)	buah	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
	h. Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (titik)	titik	0	0	1	0	0	1	1		0	1			
9	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	77.97%	77.97%	81.23%	81.23%	81.23%	81.23%	81.23%	DISHUB	77.97%	81.23%	73.34%	73.34%	67.31%
10	Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum	org, brg	510,393	510,393	504,365	536,294	563,108	591,263	591,263	DISHUB	510,393	504,365	553,565	667,199	408624
11	Jumlah orang melalui dermaga / bandara / terminal pertahun	org	259,867	259,867	273,615	286,503	300,828	315,869	315,869	DISHUB	259,867	273,615	300,227	376,958	263985
12	Jumlah barang melalui dermaga / bandara / terminal pertahun	brg	250,526	250,526	230,750	249,791	262,280	275,394	275,394	DISHUB	250,526	230,750	253,338	290,241	144639

Tabel 2.5
AnggaranTarget Renstra dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase angkutan yang layak jalan ()	522,930,000	2,197,000,000	-	-	-	424,890,000	2,197,000,000				81.25%	100.00%			
	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan yang diadakan (unit)	522,930,000	2,197,000,000	-	-	-	424,890,000	2,197,000,000				81.25%	100.00%			
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi dengan baik ()	139,000,000	242,700,000	163,600,000	121,300,000	200,000,000	134,880,000	242,700,000	286,170,000	179,590,250	89,831,300	97.04%	100.00%	174.92%	148.05%	44.92%

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal	Jumlah terminal yang dipelihara (unit)	45,000,000	70,500,000	20,500,000	28,000,000	40,000,000	41,780,000	70,500,000	20,360,000	27,735,250	9,195,000	92.84%	100.00%	99.32%	99.05%	22.99%
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte dan Trotoar	jumlah halte yang dipelihara (unit)	-	-	-	-	30,000,000		-	-		7,920,000					26.40%
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Fasilitas Keselamatan Jalan	Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang dipelihara (buah)	94,000,000	172,200,000	143,100,000	93,300,000	130,000,000	93,100,000	172,200,000	265,810,000	151,855,000	72,716,300	99.04%	100.00%	185.75%	162.76%	55.94%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana LLAJ	Persentase fasilitas LLAJ yang terbangun (%)	1,293,010,000	286,415,000	3,159,795,720	9,188,737,760	8,168,890,338	1,233,195,000	286,415,000	2,716,680,644	4,620,033,265	222,846,624	95.37%	100.00%	85.98%	50.28%	2.73%
	Pembangunan Terminal	Persentase capaian bangunan terminal (%)	1,293,010,000	286,415,000	3,081,153,000	8,320,026,500	7,283,890,338	1,233,195,000	286,415,000	2,603,103,874	4,612,097,264.69	222,846,623.71	95.37%	100.00%	84.48%	55.43%	3.06%
	Pembangunan Halte	jumlah halte bus (unit)	-	-	78,642,720	80,911,260	85,000,000		-	113,576,770	7,936,000				144.42%	9.81%	0.00%

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Darat	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan yang diadakan (unit)	-	-	-	787,800,000	800,000,000		-	-						0.00%	0.00%
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sekolah	Jumlah siswa siswi yang terangkut pertahunnya ()	-	-	4,444,000,000	555,500,000	1,455,500,000	-	4,435,999,999	1,081,484,000	412,752,030	412,752,030			24.34%	74.30%	28.36%
	Pengadaan Bus Sekolah	Jumlah bus sekolah (unit)	-	-	4,444,000,000	555,500,000	555,500,000	-	4,435,999,999	1,081,484,000					99.82%	194.69%	0.00%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bus Sekolah	Jumlah bus sekolah yang laik jalan (unit)	-	-	-	-	900,000,000	-	-	-		412,752,030					45.86%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ASDP	Persentase peningkatan sarana dan prasarana bidang ASDP (%)	418,300,000	697,507,000	1,696,430,000	561,873,280	560,000,000	697,507,000	623,854,000	107,373,000	6,000,000	6,000,000	166.75%	89.44%	6.33%	1.07%	1.07%

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Peningkatan fasilitas terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP)	jumlah fasilitas dermaga yang ditingkatkan kualitasnya (unit)	418,300,000	697,507,000	1,642,430,000	507,873,280	500,000,000	385,733,000	697,507,000	592,380,000	83,435,000		92.21%	100.00%	36.07%	16.43%	0.00%
	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Terminal ASDP	Jumlah dermaga yang dipelihara (unit)	-	-	54,000,000	54,000,000	60,000,000		-	31,474,000	23,938,000	6,000,000			58.29%	44.33%	10.00%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Persentase peningkatan fasilitas perhubungan laut (%)	-	-	867,000,000	-	-	-	-								
	Pengadaan Kapal Pengawasan / Patroli	jumlah kapal pengawasan (unit)	-	-	867,000,000	-	-		-	-							
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara	Persentase dokumen persyaratan pembangunan bandara (%)	-	5,540,000	954,450,000	954,450,000	1,500,000,000	5,540,000	-		944,484,600	944,484,600		0.00%	0.00%	98.96%	62.97%

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pembangunan Bandara	Persentase dokumen persyaratan pembangunan bandara (%)	-	5,540,000	954,450,000	954,450,000	1,500,000,000		5,540,000	-		944,484,600		100.00%	0.00%	0.00%	62.97%
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan angkutan yang aman dan nyaman ()	21,425,000	38,943,800	34,818,000	39,818,000	40,000,000	38,943,800	34,548,850	22,000,000	87,197,000	87,197,000	181.77%	88.71%	63.19%	218.99%	217.99%
	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat uji yang diadakan (set)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat PKB yang dipelihara (unit)	21,425,000	38,943,800	34,818,000	39,818,000	40,000,000	20,643,250	38,943,800	34,548,850	22,000,000	87,197,000	96.35%	100.00%	99.23%	55.25%	217.99%
	Program Peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan Lalu Lintas	Persentase angkutan yang layak ()	1,575,590,400	869,426,500	1,452,242,430	718,750,000	823,000,000	869,426,500	1,467,366,740	473,152,520.15	114,771,074.43	114,771,074.43	55.18%	168.77%	32.58%	15.97%	13.95%

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan (kali)	-	-	38,840,000	38,840,000	45,000,000		-	36,810,000	33,750,000.00				94.77%	86.89%	0.00%
	Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan	Persentase fasilitas keselamatan jalan yang diadakan (%)	1,348,345,400	654,206,500	1,290,392,430	535,000,000	628,000,000	1,276,853,600	654,206,500	1,250,543,140	213,885,014.15	9,991,874.43	94.70%	100.00%	96.91%	39.98%	1.59%
	Penyusunan regulasi di bidang perhubungan darat	Jumlah regulasi yang disusun (regulasi)	108,720,000	58,640,000	-	-	-	106,625,900	58,640,000				98.07%	100.00%			
	Pengawasan dan pengendalian Angkutan	jumlah waktu pengawasan angkutan darat (kali)	118,525,000	156,580,000	123,010,000	144,910,000	150,000,000	111,069,600	156,580,000	180,013,600	225,517,506	104,779,200	93.71%	100.00%	146.34%	155.63%	69.85%
	Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Penyeberangan	Persentase angka kecelakaan kapal ()	88,745,000	74,612,500	108,595,700	116,400,000	135,000,000	74,612,500	165,051,851	94,372,500	95,044,300	95,044,300	84.08%	221.21%	86.90%	81.65%	70.40%

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sosialisasi tentang keselamatan angkutan penyeberangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan (kali)	-	-	21,400,000	21,400,000	35,000,000		-	16,970,000	19,230,000				79.30%	89.86%	0.00%
	Pengendalian Disiplin masyarakat menggunakan angkutan di danau (kali)	Jumlah waktu pengawasan angkutan di danau (kali)	88,745,000	74,612,500	87,195,700	95,000,000	100,000,000	83,178,500	74,612,500	148,081,851	75,142,500	95,044,300	93.73%	100.00%	169.83%	79.10%	95.04%
	Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Laut dan Udara	Persentase angka kecelakaan kapal ()	44,817,000	125,008,500	167,002,500	218,872,500	245,000,000	125,008,500	203,765,659	215,162,100	74,160,000	74,160,000	278.93%	163.00%	128.84%	33.88%	30.27%
	Sosialisasi tentang keselamatan pelayaran	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan (kali)	14,840,000	20,810,000	21,400,000	21,400,000	30,000,000	14,668,000	20,810,000	19,860,000	21,850,000		98.84%	100.00%	92.80%	102.10%	0.00%
	Pengawasan angkutan laut	Jumlah kapal yang difasilitasi untuk memiliki dokumen pas kecil (unit)	29,977,000	29,947,000	38,282,500	47,362,500	55,000,000	29,907,000	29,947,000	38,057,500	47,005,000	23,745,000	99.77%	100.00%	99.41%	99.25%	43.17%

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah fasilitas pendukung pelabuhan lampia yang dibangun berdasarkan hasil koordinasi (unit)	-	74,251,500	107,320,000	150,110,000	160,000,000		74,251,500	145,848,159	146,307,100	50,415,000	100.00%	100.00%	135.90%	97.47%	31.51%
		Jumlah maskapai yang melayani penerbangan komersil di bandar udara sorowako berdasarkan hasil koordinasi (maskapai)															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)	1,775,193,650	2,038,401,300	2,378,962,000	2,927,533,000	3,219,558,000	1,624,529,751	2,038,401,300	2,173,161,775	2,471,528,073	2,143,944,913	91.51%	100.00%	91.35%	84.42%	66.59%

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda (surat)	-	-	-	3,150,000	3,150,000		-		3,150,000	3,150,000				100.00%	100.00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sda dan listrik yang terbayarkan (Rekening)	50,400,000	67,200,000	67,200,000	81,600,000	81,600,000	44,526,051	67,200,000	41,947,532	47,518,983	42,980,700	88.35%	100.00%	62.42%	58.23%	52.67%
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang terbayarkan (org)	-	47,390,000	66,440,000	-	-		47,390,000					100.00%	0.00%		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan (org,bln)	-	14,000,000	14,000,000	14,000,000	15,000,000		14,000,000	13,998,000	13,999,000	15,000,000		100.00%	99.99%	99.99%	100.00%
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara (unit)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	15,500,000	16,000,000	8,580,000	10,000,000	9,985,000	15,500,000	10,855,000	85.80%	100.00%	99.85%	100.00%	67.84%

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (jenis)	1,000,000	1,000,000	5,950,000	5,950,000	5,950,000		1,000,000	5,886,000	5,950,000	4,037,000	0.00%	100.00%	98.92%	100.00%	67.85%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	-	-	-	40,627,000	40,627,000		-		29,887,000	29,936,000				73.56%	73.68%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Jenis)	-	-	-	95,621,000	95,621,000	730,000	-		23,794,000	23,555,000				24.88%	24.63%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eksemplar)	6,060,000	6,060,000	6,060,000	6,540,000	6,540,000	4,060,000	6,060,000	6,060,000	7,620,000	7,620,000	67.00%	100.00%	100.00%	116.51%	116.51%

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (Jenis)	-	-	-	1,080,470,000	1,280,470,000		-		746,382,500	348,900,000				69.08%	27.25%
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (kotak)	-	-	-	10,600,000	10,600,000		-		10,585,000	6,573,000				99.86%	62.01%
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan (kali)	316,010,000	392,155,000	351,370,000	366,155,000	412,000,000	315,908,750	392,155,000	429,154,243	485,200,790	243,485,713	99.97%	100.00%	122.14%	132.51%	59.10%
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan (orang)	504,000,000	625,500,000	861,500,000	1,098,000,000	1,125,000,000	453,000,000	625,500,000	774,000,000	973,000,000	996,000,000	89.88%	100.00%	89.84%	88.62%	88.53%

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD	Jumlah penunjang administrasi kesekretariatan SKPD yang terpenuhi (jenis)	871,938,650	761,730,300	887,122,000	-	-	784,179,950	761,730,300	771,412,800			89.94%	100.00%	86.96%		
	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun (Dokumen)	15,785,000	30,000,000	30,360,000	30,360,000	32,000,000	13,545,000	30,000,000	30,192,000	30,030,000	18,346,000	85.81%	100.00%	99.45%	98.91%	57.33%
	Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (kali)	-	83,366,000	78,960,000	78,960,000	95,000,000		83,366,000	90,526,200	78,910,800	393,506,500		100.00%	114.65%	99.94%	414.22%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi (%)	391,252,500	1,319,820,000	1,212,932,000	1,106,132,000	370,180,000	320,182,750	1,319,820,000	1,244,911,689	762,508,285	371,589,790	81.84%	100.00%	102.64%	68.93%	100.38%

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (unit)	-	202,370,000	367,200,000	-	-		202,370,000	363,700,000				100.00%	99.05%		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (unit)	-	5,000,000	-	-	-		5,000,000					100.00%			
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit)	72,452,500	308,950,000	93,132,000	93,132,000	120,180,000	70,895,000	308,950,000	143,432,000	37,945,976	32,099,000	97.85%	100.00%	154.01%	40.74%	26.71%
	Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir	Jumlah taman/lapangan/fasilitas parkir yang dibangun (unit)	-	-	-	-	110,000,000		-								0.00%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	10,000,000	10,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	9,980,000	10,000,000	19,766,000	19,910,000	10,955,000	99.80%	100.00%	98.83%	99.55%	54.78%

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	308,800,000	793,500,000	732,600,000	993,000,000	120,000,000	239,307,750	793,500,000	718,013,689	704,652,309	328,535,790	77.50%	100.00%	98.01%	70.96%	273.78%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas, pakaian kerja lapangan dan hari-hari tertentu (%)	29,920,000	21,000,000	14,500,000	176,850,000	210,500,000	29,920,000	21,000,000	14,275,000	115,130,400	-	100.00%	100.00%	98.45%	65.10%	0.00%
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian dinas (orang)	29,920,000	-	-	51,750,000	53,000,000	29,920,000	-				100.00%			0.00%	0.00%
	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian kerja lapangan (orang)	-	21,000,000	-	125,100,000	135,000,000		21,000,000		115,130,400			100.00%		92.03%	0.00%

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian hari-hari tertentu (orang)	-	-	14,500,000	-	22,500,000		-	14,275,000					98.45%		0.00%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya ()	6,850,000	38,000,000	40,000,000	40,000,000	50,000,000	6,850,000	38,000,000	52,731,000	45,788,699	41,005,000	100.00%	100.00%	131.83%	114.47%	82.01%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan (org)	6,850,000	38,000,000	40,000,000	40,000,000	50,000,000	6,850,000	38,000,000	52,731,000	45,788,699	41,005,000	100.00%	100.00%	131.83%	114.47%	82.01%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu ()	-	4,000,000	4,000,000	10,000,000	10,000,000	-	4,000,000	3,916,000	15,366,000	6,424,000	#DIV/0!	100.00%	97.90%	153.66%	64.24%

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun (dok)	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000	3,916,000	9,368,000	2,829,000		100.00%	97.90%	234.20%	70.73%
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (dokumen)	-	-	-	6,000,000	6,000,000		-		5,998,000	3,595,000				99.97%	59.92%
	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun ()	-	10,000,000	24,570,000	24,570,000	24,570,000	-	10,000,000	33,040,000	19,960,000	8,308,500		100.00%	134.47%	81.24%	33.82%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (dokumen)	-	10,000,000	24,570,000	24,570,000	24,570,000		10,000,000	33,040,000	19,960,000	8,308,500		100.00%	134.47%	81.24%	33.82%
			6,307,033,550	7,968,374,600	16,722,898,350	16,760,786,540	17,012,198,338	5,585,485,801	13,087,923,399	8,518,430,228	9,964,313,976.12	4,618,359,131.14	88.56%	164.25%	50.94%	59.45%	27.15%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

2.4.1. Analisis RENSTRA Kementerian Perhubungan 2020-2024 dan RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

Dalam penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan dilakukan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan regional yang bersumber dari Kementerian terkait yaitu Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan kegiatannya senantiasa mengacu kepada kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka mensinergikan program / kegiatan yang akan dilaksanakan maka dilakukan koordinasi – koordinasi seperti Musrembang atau mengikuti rapat teknis yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Adapun arah kebijakan pembangunan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

- a. Kebijakan Kementerian Perhubungan (*sumber RENSTRA Kementerian Perhubungan 2020-2024*)

Fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah:

1. Konektivitas Poros Maritim;
2. Konektivitas Multimoda;
3. Keselamatan Transportasi; dan
4. Transportasi Perkotaan.

4 (empat) fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
2. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;

3. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
4. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

SS 1. Terwujudnya Konektivitas Nasional

Untuk mewujudkan tujuan: Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi.

SS 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi

Untuk mewujudkan tujuan:

1. Meningkatnya layanan transportasi yang diindikasikan dengan capaian on time performance dan penurunan emisi gas rumah kaca serta indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi;
2. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan yang diindikasikan dengan meningkatnya akuntabilitas Kementerian Perhubungan, meningkatnya tata kelola pelayanan publik, meningkatnya tata kelola kebijakan, regulasi, dan hukum, dan meningkatnya tata kelola organisasi;
3. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

SS 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Untuk mewujudkan tujuan: Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi.

b. Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan (*Sumber RENSTRA 2018-2023*)

1. Mengembangkan dan memelihara Sarana dan Prasarana Transportasi
2. Meningkatkan layanan Angkutan Penumpang dan Barang
3. Terwujudnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi sesuai Aturan Perundangan

4. Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan sepanjang 2009 Km

Adapun Telaah yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perlunya dilakukan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;
- b. Perlunya dilakukan restrukturisasi sarana dan prasarana bidang perhubungan;
- c. Perlunya dilakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) agar mampu melaksanakan tugas dengan akuntabel dan reponsif serta melaksanakan pemerintahan yang baik untuk memicu pertumbuhan ekonomi wilayah;

Dengan demikian Kebijakan Nasional Kementerian Perhubungan, serta Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan sangat mendukung dan sejalan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur

2.4.2. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Telaah rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanannya dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW Kabupaten Luwu Timur, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut

Tabel 2.6
Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Luwu Timur

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terminal Tipe C	Terminal Non Tipe Malili, Tomoni, Wondula dan Sorowako	Pembangunan Terminal Tipe C	Terminal tipe C di titik simpul transportasi dalam kabupaten	Tarengge (Wotu), Puncak Indah (Malili)
2	Bandara udara	Bandara Udara Khusus Sorowako	Dilakukan optimalisasi bandara khusus sorowako	Penggunaan bandara khusus Sorowako untuk komersil	Kec. Nuha
3	Kereta Api		Penyusunan dokumen perencanaan	Kajian administrasi dan teknis rencana jaringan kereta api	Pare – Pare – Tarengge, Poso – Tarengge, Kolaka - Tarengge
4	Fasilitas keselamatan jalan	Rambu – rambu lalu lintas	Peningkatan fasilitas keselamatan jalan	Perlengkapan keselamatan lalu lintas jalan	Jalan kabupaten

Tabel 2.7
Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)	Kawasan pemerintahan dan kawasan perdagangan	Pembangunan Terminal Tipe C	Terminal tipe C di titik simpul transportasi dalam kabupaten	Tarengge (Wotu), Puncak Indah (Malili)
2	Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan	Kawasan Tambang dan Kawasan pemerintahan	Dilakukan optimalisasi bandara khusus sorowako	Penggunaan sementara bandara khusus sorowako untuk komersil	Kec. Nuha

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Strategis Kabupaten (KSK)				
3	Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)	Hutan Lindung, sempadan sungai dan pantai, kawasan pertanian dan perikanan	Penyusunan dokumen perencanaan	- Kajian administrasi dan teknis rencana jaringan kereta api	Pare – pare – tarengge, Poso – tarengge, Kolaka - Tarengge
4	Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)	Kawasan pemerintahan dan kawasan pemukiman	Peningkatan fasilitas keselamatan jalan	Perlengkapan keselamatan lalu lintas jalan	Jalan kabupaten

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati serta kesejahteraan masyarakat. Penentuan isu – isu strategis dilakukan dengan mereview kembali faktor – faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD yang ditinjau dari :

- a) Gambaran pelayanan PD
- b) Sasaran jangka menengah pada RENSTRA Kementerian
- c) Sasaran jangka menengah pada RENSTRA PD provinsi
- d) Implikasi RTRW bagi pelayanan PD

Dalam menentukan isu – isu strategis Dinas Perhubungan tahun 2021 – 2026 dilakukan dengan metode SWOT

Faktor Internal	Faktor Eksternal
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Peluang (<i>Opportunity</i>)
Kabupaten Luwu Timur yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara	Pembangunan Terminal Tarengge dan Terminal Malili
Telah Tersedia Dermaga Penyeberangan Danau, Pelabuhan dan Bandar Udara	Pengelolaan Dermaga, Pelabuhan dan Bandara namun dibatasi oleh kewenangan
Penyediaan angkutan bus sekolah gratis	Mengurangi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas bagi anak sekolah
Tersedia unit pelayanan Penguji Kendaraan Bermotor	Pengujian terhadap kendaraan wajib uji
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
Masih minimnya penyediaan terminal, pelabuhan dan bandara sebagai pusat pergerakan manusia dan barang	Pergerakan manusia dan barang yang tidak melalui terminal dan dermaga yang sesuai standar

serta konektivitas antar daerah	
Belum maksimalnya pemenuhan perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas di jalan Kabupaten	Meningkatnya Kecelakaan lalu lintas
Masih terbatasnya penyediaan sarana transportasi massal bagi masyarakat	Meningkatnya Kecelakaan lalu lintas dan penggunaan kendaraan pribadi
Belum optimalnya penyediaan kendaraan angkutan umum yang memenuhi uji KIR	Meningkatnya Kecelakaan lalu lintas karena kendaraan yang tidak laik jalan
Peningkatan SDM melalui diklat	

Dalam menentukan prioritas isu – isu strategis Dinas Perhubungan tahun 2021 – 2026 dilakukan dengan metode pembobotan

Tabel 3.6
Nilai Skor Kriteria Penentuan Isu – Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Berdasarkan hasil review kembali faktor – faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD maka didapatkan 9 isu yang akan dijadikan isu strategis. Oleh karena untuk menguji apakah ke 9 isu tersebut dapat dijadikan isu strategis maka dilakukan pembobotan dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.7
Nilai Skala Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor	Rata Rata Skor
		1	2	3	4	5	6		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-10	
1	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Luwu Timur melalui pembangunan terminal, dermaga ASDP dan bandara udara serta penyediaan sarana angkutan anak sekolah	20	10	20	10	15	20	95	15,83
2	Tingginya angka kecelakaan karena sarana fasilitas keselamatan yang masih kurang	10	10	20	5	5	5	55	9,17
3	Tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi yang masih rendah	10	10	20	5	5	5	55	9,17
4	Operasional Pelabuhan Laut Waru – Waru	15	5	10	10	10	25	75	12,50
5	Tersedianya bandar udara di kabupaten Luwu Timur	15	5	10	10	10	25	75	12,50
8	Penambahan Jumlah personil / tenaga operasional di lapangan	5	10	10	5	5	5	40	15,83
9	Peningkatan SDM melalui diklat	5	10	10	10	5	5	45	9,17

Berdasarkan hasil pembobotan maka isu dengan bobot diatas 50 yang akan dimasukkan sebagai isu strategis. Berdasarkan tabel 3.7 maka isu nomor 1 sampai 7 layak untuk dijadikan isu strategis pada RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021.

Tabel 3.8
Susunan isu strategis yang akan ditindaklanjuti

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor
1.	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Luwu Timur melalui pembangunan terminal, dermaga ASDP dan bandara udara serta penyediaan sarana angkutan anak sekolah	95
2.	Operasional Pelabuhan Laut Waru – Waru	75
3.	Tersedianya bandara udara di kabupaten Luwu Timur	75
6.	Tingginya angka kecelakaan karena sarana fasilitas keselamatan yang masih kurang	55
7.	Tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi yang masih rendah	55

3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Selama periode pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 sampai 2020 terdapat beberapa permasalahan yang belum dapat diatasi. Jika mengacu ke tabel 2.4 tentang Review Pencapaian Kinerja Pelayanan PD, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak tercapainya beberapa target karena pengembangan infrastruktur perhubungan yang masih belum maksimal, meskipun terdapat beberapa target yang dapat dicapai dengan baik. Berikut permasalahan pelayanan di bidang perhubungan yang dicatat selama periode 2021 – 2026 :

1. Prasarana perhubungan untuk mendukung terwujudnya sistem transportasi kota yang sesuai hirarki tata ruang (RTRW) belum berjalan optimal, antara lain pembangunan Terminal Tarengge dan Terminal Malili yang masih sementara berjalan karena proses pembangunan harus dilaksanakan secara bertahap karena terkendala anggaran.
2. Terbatasnya kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Angkutan Danau, Bidang Laut dan Bidang Penerbangan.
3. Kebutuhan akan sarana transportasi udara menjadi sangat penting di Luwu Timur karena rentang jarak yang jauh sekitar 12 jam perjalanan darat dari ibu kota provinsi sulawesi selatan (Makassar). Pemerintah daerah telah berupaya menggunakan Bandara Khusus Sorowako dapat melayani penerbangan umum / komersil belum dapat terwujud di tahun 2015, dikarenakan panjang landasan (*runway*) yang ada saat ini belum cukup untuk dapat didarati pesawat kapasitas 70 penumpang;
4. Masih tingginya pelanggaran lalu lintas utamanya angkutan umum khususnya dalam hal pengurusan ijin dan buku keur, sehingga perlu peningkatan operasi penertiban lalu lintas dan angkutan;
5. Tingginya angka kecelakaan karena sarana fasilitas keselamatan jalan berupa rambu – rambu dan marka harus masih kurang sehingga harus dilakukan penambahan;
6. Jumlah kendaraan bus sekolah yang ada saat ini dirasakan masih kurang memenuhi kebutuhan dasar bus sekolah untuk mengangkut siswa sekolah yang

rumahnya jauh dari sekolahnya. Oleh karena itu harus segera dilakukan penambahan unit baik dibiayai oleh APBD maupun bantuan dari Kementerian Perhubungan;

7. Saat ini kualitas SDM pelaku transportasi masih rendah dan kualitas SDM yang ada belum sesuai dengan perkembangan teknologi transportasi. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan pengembangan dan peningkatan SDM transportasi.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Prasarana perhubungan untuk mendukung terwujudnya sistem transportasi kota yang sesuai hirarki tata ruang (RTRW) belum berjalan optimal	pembangunan Terminal Tarengge dan Terminal Malili yang masih sementara berjalan	Alokasi anggaran
2	Kebutuhan akan sarana transportasi udara menjadi sangat penting di Luwu Timur karena rentang jarak yang jauh sekitar 12 jam perjalanan darat dari ibu kota provinsi sulawesi selatan (Makassar)	Pemerintah daerah telah berupaya menggunakan Bandara Khusus Sorowako dapat melayani penerbangan umum / komersil belum dapat terwujud	dikarenakan panjang landasan (<i>runway</i>) yang ada saat ini belum cukup untuk dapat didarati pesawat kapasitas 70 penumpang

3	tingginya pelanggaran lalu lintas	Khususnya angkutan umum yang masih lalai dalam hal pengurusan ijin dan buku keur	Kelalaian dari pemilik kendaraan layak uji dan masih kurangnya operasi penertiban lalu lintas dan angkutan
4	Tingginya angka kecelakaan	Kurangnya fasilitas keselamatan jalan	Kurangnya kesadaran dari pengendara dan belum optimalnya fasilitas keselamatan jalan berupa rambu-rambu dan marka jalan
5	Siswa siswi sekolah belum seluruhnya merasakan layanan antar jemput bus sekolah	Jumlah kendaraan bus sekolah yang ada saat ini masih kurang	Semakin bertambahnya jumlah siswa siswi sekolah
6	Kualitas SDM pelaku transportasi masih rendah	kualitas SDM yang ada belum sesuai dengan perkembangan teknologi transportasi	Masih Kurangnya pengembangan dan peningkatan SDM transportasi

3.3. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur terpilih periode 2021 -2026 adalah “Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”.

Pernyataan visi ini ditindaklanjuti dengan 6 misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas.
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.

5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Jika menilik misi Bupati dan Wakil Bupati dan penjelasan pada program prioritasnya, maka pelayanan Dinas Perhubungan memiliki keterkaitan pada 1 misi yaitu :

Misi 3 :

“Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas”

Misi ini mencakup upaya meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan, meningkatkan kapasitas perhubungan udara, darat, laut dan danau, mengembangkan perumahan dan permukiman, meningkatkan kapasitas infrastruktur sumberdaya air dan irigasi, memenuhi infrastruktur dasar masyarakat pesisir, dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan program – program yang terdapat dalam Visi dan Misi maka Dinas Perhubungan selaku penanggung jawab fungsi pemerintahan bidang perhubungan menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi PD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan PD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 3 : Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas			
	a. pembangunan Terminal Tarengge dan Terminal Malili	pembangunan Terminal Tarengge dan terminal Malili masih sementara berjalam	Alokasi anggaran	- kawasan tarengge merupakan kawasan strategis untuk dikembangkan sebagai terminal karena menjadi perlintasan kendaraan umum trayek dalam daerah dalam provinsi dan luar provinsi (palu, manado, kendari)
	b. Pengadaan Bus Sekolah	- bus sekolah yang ada belum memadai untuk melayani siswa & siswi sekolah yang ada di 11 kecamatan	- sarana angkutan umum yang layak untuk digunakan siswa & siswi sekolah belum memadai bahkan cenderung kurang. Rata - rata siswa siswi menggunakan kendaraan motor sehingga kurang aman	- program pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan gratis secara menyeluruh

3.4. Telaah RENSTRA Kementerian Perhubungan, Kementerian serta Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

3.2.1. Telaah RENSTRA Kementerian Perhubungan

Telaah RENSTRA Kementerian Perhubungan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra PD. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara RENSTRA PD kabupaten dengan Renstra kementerian serta mencegah tumpang

tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau kementerian dengan kabupaten.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				
Penguatan Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan				
1.	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi <i>backlog</i> maupun <i>bottleneck</i> kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda	- belum tersedianya bandara udara yang melayani penerbangan umum - sarana pendukung dermaga penyeberangan ASDP masih kurang	- panjang runway bandara sorowako belum cukup untuk didarati pesawat tipe ATR 72 - Kondisi infrastruktur ASDP belum optimal karena sarana pendukung dermaga seperti	- saat ini sedang dilakukan penambahan panjang runway 250mtr sehingga totalnya menjadi 1.350mtr, kemungkinan selesai tahun 2017 - dermaga penyeberangan ASDP sebagai sarana transportasi utama dalam penyeberangan di danau matano dan towuti, sehingga perlu segera dilengkapi dengan sarana pendukung
2.	Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi	Masih tingginya pelanggaran lalu lintas utamanya angkutan umum khususnya dalam hal pengurusan ijin dan buku keur	- pemilik kendaraan cenderung malas mengurus ijin dan menguji kendaraannya. - teanga operasional untuk pengawasan dan pengujian sedikit.	Sering dilakukan sosialisasi di lapangan pada saat kegiatan operasi di jalan
3.	Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) di sektor transportasi			
4.	Tersedianya layanan transportasi di perdesaan, perbatasan negara,	Jumlah kendaraan bus sekolah yang ada saat ini dirasakan masih	- Kendaraan Angkutan umum dalam kota sangat sedikit yang bisa digunakan siswa untuk	- jumlah siswa sekolah yang sudah diangkut selama ini masih sedikit dibandingkan yang belum

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya	kurang memenuhi kebutuhan dasar bus sekolah untuk mengangkut siswa sekolah yang rumahnya jauh dari sekolahnya	ke sekolah. - lokasi sekolah yang masih berada di ibukota kecamatan sehingga siswa yang tinggal jauh dari kecamatan jadi kesulitan akses sekolah - orang tua cenderung memberikan kendaraan bermotor ke anaknya untuk ke sekolah, padahal ini sangat tidak aman.	diangkut - tingginya kepercayaan siswa untuk menjadikan bus sekolah sebagai sarana angkutan ke sekolah.
Pembangunan Transportasi Umum Massal Perkotaan				
6.	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan	Prasarana perhubungan untuk mendukung terwujudnya sistem transportasi kota yang sesuai hirarki tata ruang (RTRW) belum berjalan optimal, antara lain belum terwujudnya pembangunan Terminal Tarengge dan Terminal Malili	-Pembangunan Terminal Malili dan Tarengge masih seentara berlangsung	- telah diatur dalam RTRW 2010 – 2030 mengenai rencana pembangunan terminal malii dan tarengge - masuk dalam visi dan misi bupati terpilih
7.	Meningkatkan kinerja lalu lintas jalan Perkotaan	Tingginya angka kecelakaan karena sarana fasilitas keselamatan jalan berupa rambu – rambu dan marka masih kurang	- masih banyak jalan yang belum dipasang rambu – rambu lalu lintas - kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan berlalu lintas	- adanya dana DAK bidang keselamatan transportasi darat dari kementerian perhubungan
8.	Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi Perkotaan			

3.2.2. Telaah RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

Telaah RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra PD. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara RENSTRA PD kabupaten dengan Renstra PD provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau kementerian dengan kabupaten

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra PD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Kabupaten/kota	Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antar moda dan antar wilayah serta pengembangan pendidikan unggulan transportasi yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul perhubungan luar Jawa	- sarana pendukung dermaga penyeberangan ASDP masih kurang	- Kondisi infrastruktur ASDP belum optimal karena sarana pendukung dermaga seperti ruang tunggu, WC, kantor dan kios belum tersedia	- dermaga penyeberangan ASDP sebagai sarana transportasi utama dalam penyeberangan di danau matano dan towuti, sehingga perlu segera dilengkapi dengan sarana pendukung
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi, di Provinsi Sulawesi Selatan;			
3.	Terwujudnya pelayanan bidang transportasi, yang berkualitas di			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Kabupaten/kota	Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sulawesi Selatan;			
4.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan transportasi,;			

3.5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari tiga dimensi utama yaitu daerah pantai, dataran sampai ke daerah yang berbukit. Sebagian besarnya didominasi oleh wilayah pegunungan (459.946,81 ha). Hal ini menggambarkan suatu daerah menyimpan potensi kandungan sumberdaya alam yang melimpah.

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur untuk dijadikan Asset pengembangan dimasa yang akan datang, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2030 secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Potensi ketersediaan lahan masih luas, dimana kepadatan penduduk yang ada masih rendah sehingga masih dapat dimanfaatkan untuk berbagai pengembangan kegiatan perekonomian.
2. Potensi hutan dan kekayaan hutan yang masih beragam dan cukup tersedia sejalan dengan visi kabupaten. Potensi ini dapat dikembangkan untuk usaha agribisnis dan bisnis kehutanan. dimana kondisi eksisting menunjukan bahwa kawasan hutan di Kabupaten Luwu Timur mencapai 62,46 % dari total luas Kabupaten Luwu Timur.
3. Tingkat perkembangan antar kecamatan yang cukup merata. Hal ini ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana di tiap kecamatan cukup merata, khususnya sarana pendidikan, Kesehatan, perdagangan dan peribadatan.
4. Potensi sektor pertambangan, di mana sektor ini merupakan sektor yang sangat besar memberikan kontribusi bagi pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur.

5. Kawasan wisata yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Obyek wisata yang ada pun bervariasi jenisnya, yaitu berupa obyek wisata alam, budaya, bahari, dsb. Berikut ini dijelaskan mengenai obyek-obyek wisata yang terdapat di masing-masing kecamatan di Kabupaten Luwu Timur. Lokasi kawasan wisata tersebut masih memerlukan pembenahan dan pengelolaan dengan upaya peningkatan infrastruktur pendukung kawasan wisata, Potensi ekowisata dan wisata bahari.

Potensi prasarana wilayah yang di miliki oleh Kabupaten Luwu Timur yang dapat dijadikan aset untuk pengembangan di masa yang akan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya jaringan jalan regional yang melewati wilayah Kabupaten Luwu Timur (jalan arteri primer) yang menghubungkan Kabupaten Luwu Timur dengan Kota Makassar, Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Morowali) serta Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Tenggara (Kabupaten Kendari).
2. Terdapat Pelabuhan Laut Lampia yang keberadaannya diharapkan dapat membuka keterisolasian daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau oleh transportasi darat.
3. Adanya bandar udara di Sorowako yang dapat menghubungkan wilayah Kabupaten Luwu Timur dengan wilayah lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Potensi pengembangan pelabuhan di Malili untuk memperkuat keterkaitan dengan wilayah eksternal.

Telaah rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka PD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kawasan Strategis Kabupaten			
1.	kawasan pemerintahan; diarahkan berpusat di ibukota kabupaten pada kecamatan Malili.	Tingginya angka kecelakaan karena sarana fasilitas keselamatan jalan berupa rambu – rambu dan marka masih kurang	- masih banyak jalan yang belum dipasang rambu – rambu lalu lintas - kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan berlalu lintas	- adanya dana DAK bidang keselamatan transportasi darat dari kementerian perhubungan
2.	kawasan cepat tumbuh; diarahkan sebagai pusat kegiatan Pemerintahan dan Perekonomian pada masing-masing wilayah kecamatan yang terdiri atas perkotaan tomoni, burau, wonorejo, kalaena, kertoraharjo, solo, wawondula, wsuponda	- sarana pendukung dermaga penyeberangan ASDP masih kurang	- Kondisi infrastruktur ASDP belum optimal karena sarana pendukung dermaga seperti ruang tunggu, WC, kantor dan kios belum tersedia	- dermaga penyeberangan ASDP sebagai sarana transportasi utama dalam penyeberangan di danau matano dan towuti, sehingga perlu segera dilengkapi dengan sarana pendukung
3.	Kawasan Strategis Nasional Sorowako adalah kawasan Strategis yang ditetapkan dalam RTRWN, adalah kegiatan pertambangan dan pengolahan hasil tambang	- belum tersedianya bandara udara yang melayani penerbangan umum	- panjang runway bandara sorowako belum cukup untuk didarati pesawat tipe ATR 72	- saat ini sedang dilakukan penambahan panjang runway 250mtr sehingga totalnya menjadi 1.350mtr, kemungkinan selesai tahun 2017

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing Misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan Visi.

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur menggambarkan arah strategi dan peluang-peluang yang ingin diciptakan untuk mencapai Visi Misi Tahun 2021-2026 adalah :

**“Meningkatkan Pelayanan Transportasi Guna Mendukung
Aksesibilitas Yang Lancar Dan Aman”**

Sasaran diartikan sebagai hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan visi-misi. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk lima tahun kedepan. Berikut disajikan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur periode tahun 2021-2026 :

1. Meningkatnya Kualitas Konektivitas Transportasi
2. Meningkatnya keselamatan dan Keamanan Transportasi
3. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

Secara lebih seksama, keterkaitan antara misi pembangunan jangka menengah Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur periode tahun 2021-2026 dengan tujuan, sasaran dan indikator-indikator pembangunan yang digunakan dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Asumsi Realisasi	TARGET				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pelayanan Transportasi Guna Mendukung Aksesibilitas Yang Lancar Dan Aman		Persentase peningkatan pengguna infrastruktur Perhubungan	%	6.89	52.67	56.75	60.87	65.02	69.22
		Meningkatnya Kualitas Konektivitas Transportasi	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	0.30	0.58	0.63	0.67	0.72	0.77
		Meningkatnya keselamatan dan Keamanan Transportasi	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	%	76.35	77.87	79.35	80.76	82.03	83.32
			Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	Rasio	0,00	0,00	0,00	0,27	0,20	0,13
2	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Dinas Perhubungan		Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Angka	66,22	70,35	73,24	75,26	80,25	82,55
		Meningkatnya kualitas dan pencaipan kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Angka	66,22	70,35	73,24	75,26	80,25	82,55

Sasaran dan indikator ini ditetapkan sesuai dengan arahan coaching dari tim Kemenpan-RB

Definisi Operasional Tujuan Renstra Dinas Perhubungan

KABUPATEN LUWU TIMUR 2021-2026

No.	Tujuan Renstra	Definisi Tujuan	Indikator	Definisi Indikator	Formulasi
1	Tujuan Dinas Perhubungan				
	1 Meningkatkan Pelayanan Transportasi Guna Mendukung Aksesibilitas Yang Lancar Dan Aman	Meningkatkan pelayanan transportasi yang ada di Kabupaten Luwu Timur baik melalui transportasi darat, transportasi danau dan transportasi udara agar tercipta kemudahan dalam menjangkau lokasi yang akan ditujuh melalui sitem transportasi yang lancar dan aman bagi masyarakat	Persentase peningkatan pengguna infrastruktur Perhubungan	Persentase peningkatan pengguna Terminal, Dermaga, Bus Sekolah/angkutan umum	(Jumlah orang barang yang melewati dermaga,terminal, bandara dan yang terangkut bus sekolah tahun n - tahun 0)/tahun-0
	2 Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Dinas Perhubungan	Meningkatkan pertanggungjelasan atas segala aktivitas penyelenggaraan layanan Perhubungan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan serta dapat mempertanggungjawabkan hasil atas anggaran yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP oleh Inspektorat	Nilai SAKIP oleh Inspektorat

Definisi Operasional Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Perbaikan

KABUPATEN LUWU TIMUR 2021-2026

No.	Sasaran Renstra	Definisi Sasaran	Indikator	Definisi Indikator	Formulasi
1	Sasaran Eselon II				
	1 Meningkatkan Kualitas Konektivitas Transportasi	Meningkatkan hubungan antar wilayah dan memberi kemudahan arus penumpang atau barang dari satu simpul transportasi untuk mencapai simpul lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem transportasi yang lancar dan aman bagi masyarakat	Rasio Konektivitas Kabupaten	$(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$	$(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$
	2 Meningkatkan keselamatan dan Keamanan Transportasi	Melaksanakan kegiatan pengawasan serta penyediaan fasilitas keselamatan jalan sesuai dengan fungsinya, sebagai upaya terhindarnya arus penumpang atau barang dari resiko kecelakaan selama beroperasi atau berlalu lintas	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	Persentase angkutan penumpang umum dan angkutan barang yang memiliki ijin KIR dan ijin berlayar di laut (GT<7) dan di Danau dinyatakan telah layak untuk beroperasi	$((\text{Jumlah angkutan umum yang memiliki izin laik operasi}) / (\text{Jumlah angkutan umum yang seharusnya memiliki izin laik beroperasi})) \times 100\%$
			Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	Perbandingan kejadian kecelakaan angkutan tidak laik jalan dengan jumlah kecelakaan angkutan wajib uji	Jumlah kejadian kecelakaan angkutan wajib uji yang tidak laik jalan tahun n / jumlah kejadian kecelakaan angkutan wajib uji tahun n
	3 Meningkatkan kualitas dan pencaipan kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Perhubungan	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Perhubungan melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan serta dapat mempertanggungjawabkan hasil atas anggaran yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Opini yang dikeluarkan oleh Inspektorat terhadap laporan SAKIP tahun-n	Nilai SAKIP oleh Inspektorat terhadap laporan SAKIP tahun-n

No.	Indikator Sasaran Renstra	Formulasi	Keterangan Formulasi	Penetapan Target
1.	Rasio Konektivitas Kabupaten	(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	➢ IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi (jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) ➢ IK2 (Angkutan sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd Kabupaten/Kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota tersebut) Keterangan : IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan sungai, danau, penyeberangan) - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antara wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot angkutan jalan atau sungai, danau dan penyeberangan - Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) - Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan jalan = 50) - Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) - Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas : - Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 - Bobot trayek lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), = 0.8 - Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), bobot = 0.5	Penetapan target berdasarkan data awal : Jumlah trayek yang ditetapkan 15 Bobot trayek 1 Bobot angkutan jalan 70% Jumlah kebutuhan lintas 8 Bobot Lintas 1 Bobot angkutan sungai danau dan penyeberangan 30% Setiap tahunnya diasumsikan bahwa jumlah trayek yang akan dilayani bertambah 1 trayek
2.	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	((Jumlah angkutan umum yang memiliki izin laik operasi) / (Jumlah angkutan umum yang	Jumlah angkutan umum yang berijin adalah jumlah angkutan penumpang umum dan barang di darat, jumlah kapal penumpang di danau dan jumlah kapal GT<7 dilaut yang memiliki ijin beroperasi	Penetapan target berdasarkan data awal : Jumlah angkutan wajib uji (angkutan

		seharusnya memiliki izin laik beroperasi)) x 100%)	Jumlah angkutan umum adalah jumlah angkutan penumpang umum dan barang di darat, jumlah kapal penumpang di danau dan jumlah kapal GT<7 dilaut	penumpang umum dan barang) yang ada dan yang laik uji diasumsikan naik setiap tahunnya Jumlah kapal yang akan difasilitasi tiap tahunnya diasumsikan juga meningkat
3.	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	Jumlah kejadian kecelakaan angkutan tidak laik jalan tahun n/jumlah kejadian kecelakaan angkutan wajib uji tahun n	Jumlah kejadian kecelakaan angkutan tidak laik jalan berdasarkan hasil olah TKP Jumlah kejadian kecelakaan angkutan wajib uji adalah jumlah kejadian kecelakaan yang dialami angkutan penumpang umum dan angkutan barang	Jumlah kejadian kecelakaan angkutan tidak laik jalan dan jumlah kejadian kecelakaan angkutan wajib uji diasumsikan turun setiap tahun
4.	Persentase capaian kinerja program Dinas Perhubungan	(Jumlah persentase capaian kegiatan/jumlah kegiatan)	Jumlah persentase capaian kegiatan adalah jumlah persentase capaian realisasi kegiatan di bagian sekretariat Jumlah kegiatan adalah jumlah kegiatan di bagian sekretariat	Penetapan target 100% karena diharapkan realisasi capaian semua kegiatan rutin maksimal diangka 100%

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam RENSTRA diperlukan strategi. **Strategi** adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Adapun Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur akan ditempuh dengan menetapkan kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang di tetapkan oleh pihak yang berwenang untuk di jadikan pedoman bagi setiap organisasi, agar adanya keterpaduan dan upaya untuk mencapai Visi dan Misi.

Adapun Strategi dan Kebijakan yang di tetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur adalah :

Visi : Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya			
Misi : Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan transportasi guna mendukung aksesibilitas yang lancar dan aman	Meningkatnya Kualitas Konektivitas Transportasi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana transportasi yang menunjang kelancaran arus transportasi	Penyediaan prasarana transportasi yang menunjang kelancaran arus transportasi dan keselamatan berlalu lintas
			Pemeliharaan prasarana transportasi yang mendukung kontinuitas pelayanan
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan angkutan menuju fasilitas publik seperti sekolah, pasar dan objek wisata yang mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah	Penyediaan dan pemeliharaan sarana angkutan yang aman dan nyaman guna membantu masyarakat mengakses fasilitas publik
	Meningkatnya keselamatan dan Keamanan Transportasi	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan sehingga menciptakan ketertiban dan keselamatan pengoperasian angkutan umum	Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna mendapatkan bantuan sarana transportasi
			Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan (kepolisian, BPTD)
			Peningkatan edukasi / sosialisasi keselamatan angkutan kepada masyarakat
			Pengembangan layanan pengujian kendaraan bermotor yang berbasis IT

Misi : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)			
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan guna tercapainya target kinerja dan keuangan serta melaporkannya dengan tertib	Merencanakan dan melaksanakan program / kegiatan secara konsisten mengacu kepada dokumen perencanaan jangka menengah dinas (RENSTRA), dengan harapan seluruh target Bupati – Wakil Bupati yang dibebankan kepada Dinas Perhubungan dapat dicapai dalam kurun 5 tahun;
			Mendorong pegawai yang diberi tanggungjawab kegiatan agar melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan petunjuk dan membuat laporan pertanggungjawaban secara benar dan tepat waktu
			Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan program / kegiatan. Jika terdapat permasalahan, hal – hal yang menyimpang, deviasi capaian target, agar segera dilakukan perbaikan dan revisi target

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program PD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per PD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan PD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah PD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Tabel 6.1
Kebijakan dan Program

No.	Strategi	Kebijakan	Program
1.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Transportasi	Penyediaan prasarana transportasi yang menunjang kelancaran arus transportasi dan keselamatan berlalu lintas	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Program Pengelolaan Pelayaran
		Pemeliharaan prasarana transportasi yang mendukung kontinuitas pelayanan	
		Penyediaan dan pemeliharaan sarana angkutan yang aman dan nyaman guna membantu masyarakat mengakses fasilitas publik	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna mendapatkan bantuan sarana transportasi	
		Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan (kepolisian,	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

No.	Strategi	Kebijakan	Program
		BPTD)	- Program Pengelolaan Pelayaran
		Peningkatan edukasi / sosialisasi keselamatan angkutan kepada masyarakat	
		Pengembangan layanan pengujian kendaraan bermotor yang berbasis IT	
2.	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan guna tercapainya target kinerja dan keuangan serta melaporkannya dengan tertib	Merencanakan dan melaksanakan program / kegiatan secara konsisten mengacu kepada dokumen perencanaan jangka menengah dinas (RENSTRA), dengan harapan seluruh target Bupati – Wakil Bupati yang dibebankan kepada Dinas Perhubungan dapat dicapai dalam kurun 5 tahun;	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Mendorong pegawai yang diberi tanggungjawab kegiatan agar melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan petunjuk dan membuat laporan pertanggungjawaban secara benar dan tepat waktu	
		Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan program / kegiatan. Jika terdapat permasalahan, hal – hal yang menyimpang, deviasi capaian target, agar segera dilakukan perbaikan dan revisi target	

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas Dinas Perhubungan adalah :

Tabel 6.2
Program dan Kegiatan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Fasilitas Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Pengadaan Mabel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	
		Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten / kota
		Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
		Pembangunan gedung terminal
		Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
		Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
		Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor
		registrasi Kendaraan Wajib Uji
		Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	
		Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten / kota
		Forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten / kota
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	
		Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	
		Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten / kota
Program Pengelolaan Pelayaran	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha dan yang berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten / Kota	
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
		Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan kabupaten / kota
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
		Pembangunan pelabuhan sungai dan danau
		Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau
	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	
		Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

6.2 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan PD

Tabel 6.3
Kelompok Sasaran Per Kegiatan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Aparatur Dinas Perhubungan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Aparatur Dinas Perhubungan
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Aparatur Dinas Perhubungan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Aparatur Dinas Perhubungan
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Aparatur Dinas Perhubungan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Aparatur Dinas Perhubungan
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Aparatur Dinas Perhubungan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran
1	2	3	4
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Aparatur Dinas Perhubungan
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Aparatur Dinas Perhubungan
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Aparatur Dinas Perhubungan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aparatur Dinas Perhubungan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Aparatur Dinas Perhubungan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Aparatur Dinas Perhubungan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Aparatur Dinas Perhubungan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Aparatur Dinas Perhubungan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Aparatur Dinas Perhubungan
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Aparatur Dinas Perhubungan dan Tamu Dinas Perhubungan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Aparatur Dinas Perhubungan
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
		Pengadaan Mabel	Aparatur Dinas Perhubungan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Aparatur Dinas Perhubungan
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Aparatur Dinas Perhubungan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur Dinas Perhubungan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran
1	2	3	4
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aparatur Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Aparatur Dinas Perhubungan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Aparatur Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Aparatur Dinas Perhubungan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Aparatur Dinas Perhubungan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Aparatur Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota		
		Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten / kota	Pengguna jalan kabupaten/kota
		Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Pengguna jalan kabupaten/kota
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		
		Pembangunan gedung terminal	Pengguna fasilitas terminal
		Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)	Pengguna fasilitas terminal
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		
		Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	Masyarakat Kab.Luwu Timur pengguna fasilitas parkir
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran
1	2	3	4
		Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Pemilik kendaraan wajib uji
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji	Pemilik kendaraan wajib uji
		Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Pemilik kendaraan wajib uji
	Pelaksanaan Menejemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota		
		Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten / kota	Pengguna jalan kabupaten/kota
		Forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten / kota	Pengguna jalan kabupaten/kota
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		
		Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Siswa dan siswi SMA dan SMP
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		
		Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten / kota	Masyarakat pemilik kendaraan wajib uji
Program Pengelolaan Pelayaran	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha dan yang berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten / Kota		

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran
1	2	3	4
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pemilik Kapal <GT7
		Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan kabupaten / kota	Pemilik Kapal <GT7
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		
		Pembangunan pelabuhan sungai dan danau	Masyarakat pengguna fasilitas dermaga
		Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	Masyarakat pengguna fasilitas dermaga
	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha		
		Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Masyarakat pengguna fasilitas dermaga
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat pengguna fasilitas dermaga

6.3 Pagu Indikatif

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada Tabel 6.3 berikut ini

Tabel 6.3
Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif 2021 – 2026

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Asumsi Realisasi 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
	Meningkatkan pelayanan transportasi guna mendukung aksesibilitas yang lancar dan aman	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi	Rasio Konektivitas Kabupaten /Kota				0.3	0.3	7,563,816,648	0.58	10,191,706,990	0.63	16,418,892,337	0.67	10,505,283,427	0.72	4,685,341,871	0.77	4,355,113,362	0.77	53,720,154,635	
		Meningkatnya keselamatan dan Keamanan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi				0	0		0		0		0		0.27		0.20		0.20		
			Persentase angkutan umum yang laik beroperasi (%)				75.14	76.35		77.87		79.35		80.76		82.03		83.32		83.32		

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Asumsi Realisasi 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan (%)	2.06	45.08	7,104,993,819	52.46	9,362,585,774	67.37	16,034,734,828	79.90	10,080,045,828	92.31	4,243,316,828	100.00	3,900,977,828	100.00	50,726,654,905	
					Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan (%)	94.05	94.07	94.24		94.41		94.57		94.73		94.88		94.88				
					Persentase Kejadian Kecelakaan angkutan wajib uji (%)	0	0	0		0		0		0,27		0,20		0,20				
				002.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	persentase perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik (%)	100	100	432,468,368	100.00	289,968,983	100.00	1,043,505,828	100.00	696,655,828	100.00	762,205,828	100.00	315,705,828	100.00	3,540,510,663	
				002.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan yang disediakan (Jenis)		2.00	253,757,540											253,757,540		
				002.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang disediakan (jenis)				1.00	124,763,155	2.00	931,300,000	2.00	584,450,000	2.00	650,000,000	1.00	203,500,000	8.00	2,494,013,155	
				002.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan yang dipelihara (unit)		48.00	178,710,828										48.00	178,710,828		
				002.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan	Jumlah perlengkapan jalan yang				48.00	165,205,828	48.00	112,205,828	48.00	112,205,828	48.00	112,205,828	48.00	112,205,828	48.00	614,029,140	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Asumsi Realisasi 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
					Jalan	dipelihara (Unit)													8			
				002.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah orang (L/P) yang terangkut melalui terminal (Orang)	209,996.00	214,144.00	3,083,415,866	218,426.00	5,694,415,005	222,795.00	6,595,120,000	227,251.00	6,066,120,000	231,796.00	76,120,000	236,432.00	86,120,000	1,350,844.00	21,601,310,871	
				002.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang di pelihara/dir ehabilitasi (unit)	3	3	12,815,866	3,000	39,815,866	3,000	46,120,000	3,000	66,120,000	3,000	76,120,000	3,000	86,120,000	3,000	327,111,732	
				002.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Persentase capaian bangunan terminal (%)	30.88	43.42	3,070,600,000	53.61	5,654,599,139	78.50	6,549,000,000	100.00	6,000,000,000	- .00	-	- .00	-	100.00	21,274,199,139	
				002.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah titik parkir yang diselenggarakan / diusahakan (Titik)				15.00	21,600,000	21.00	30,240,000	26.00	37,440,000	30.00	43,200,000	35.00	50,400,000	127.00	182,880,000	
				002.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan titik parkir (Kali)				180.00	21,600,000	252.00	30,240,000	312.00	37,440,000	360.00	43,200,000	420.00	50,400,000	1,524.00	182,880,000	
				002.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan wajib Uji yang laik	2,640.00	1,500.00	268,868,875	2,733.00	193,000,000	2,820.00	5,347,000,000	2,909.00	184,000,000	3,001.00	189,000,000	3,096.00	199,000,000	3,096.00	6,380,868,875	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Asumsi Realisasi 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
						jalan (unit)																
						Jumlah kendaraan yang diuji (unit)	2,807.00	1,500.00		2,900.00		2,987.00		3,076.00		3,168.00		3,263.00		3,263.00		
				002.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana PKB yang dipelihara (Unit)	11	11	23,625,000	11.00	24,000,000	11.00	25,000,000	11.00	50,000,000	11.00	55,000,000	11.00	60,000,000	11.00	237,625,000	
				002.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (kali)	3,425.00	1,500.00	245,243,875	3,431.00	47,000,000	3,441.00	47,000,000	3,451.00	134,000,000	3,461.00	134,000,000	3,471.00	139,000,000	18,755.00	746,243,875	
				002.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana PKB yang disediakan (Set/Unit)				1.00	122,000,000	1.00	5,275,000,000	- .00	-	- .00	-	- .00	-	2.00	5,397,000,000	
				002.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi manajemen lalu lintas yang dikeluarkan (Rekomendasi)	- .00	22.00	153,416,235	22.00	157,000,000	22.00	162,000,000	22.00	167,000,000	22.00	172,000,000	22.00	177,000,000	132.00	988,416,235	
				002.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Lalu Lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan yang				4.00	12,000,000	4.00	12,000,000	4.00	12,000,000	4.00	12,000,000	4.00	12,000,000	20.00	60,000,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Asumsi Realisasi 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
						responsive gender (kali)																
				002.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan manajemen rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan (Kali)				18.00	145,000,000	18.00	150,000,000	18.00	155,000,000	18.00	160,000,000	18.00	165,000,000	90.00	775,000,000	
				002.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengumpulan data manajemen lalu lintas (laporan)	0	23.00	153,416,235	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	23.00	153,416,235	
				002.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase kepemilikan KIR angkutan Wajib Uji (%)		0.0593	218,828,875.00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	0.06	218,828,875	
				002.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah inspeksi yang dilakukan unit pelaksana uji kendaraan (kali)		24.00	218,828,875.00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	24.00	218,828,875	
				002.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang (L/P) yang terangkut angkutan umum yang diusahakan oleh pemda (orang)	72,900.00	24,300.00	2,947,995.600	30,240.00	2,865,972,911	31,320.00	2,714,369,000	32,400.00	2,783,830,000	33,480.00	2,853,291,000	34,560.00	2,922,752,000	1,644,300.00	17,088,210,511	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Asumsi Realisasi 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				002.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan yang disediakan (unit)	27.00	4.00	2,947,995,600	1.00	2,865,972,911	1.00	2,714,369,000	1.00	2,783,830,000	1.00	2,853,291,000	1.00	2,922,752,000	9.00	17,088,210,511	
						Jumlah kendaraan yang dimanfaatkan dan dipelihara (unit)	27.00	27.00		28.00		29.00		30.00		31.00		32.00		177.00		
				002.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio ijin trayek (%)		0.01		0.01	140,628,875	0.01	142,500,000	0.01	145,000,000	0.01	147,500,000	0.01	150,000,000	0.01	725,628,875	
						Persentase kepemilikan KIR angkutan Wajib Uji (%)		5.93		5.76		5.59		5.43		5.27		5.12		5.12		
				002.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan perizinan angkutan (KIR dan Izin Trayek) (Kali)				24.00	140,628,875	24.00	142,500,000	24.00	145,000,000	24.00	147,500,000	24.00	150,000,000	24.00	725,628,875	
				3	PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Kapal yang	16.85	22.	420,5	27.	829,12	31.	384,157,	36.	425,237,59	40.	442,025,	45.	454,1	45.1	2,955,1	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Asumsi Realisasi 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
					PELAYARAN	laik berlayar di laut (%)		17	21,104	17	1,216	98	509	57	9	86	043	18	35,534	8	98,005	
						Persentase Kapal yang laik berlayar di danau (%)	0	12.50		25.00		43.75		68.75		87.50		100.00		100.00		
				003.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kapal yang laik beroperasi di laut (unit)	150	200	197,089,008	250	141,200,000	300	146,200,000	350	183,400,000	400	193,400,000	450	199,400,000	450	1,060,689,008	
				003.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan kawasan pelabuhan laut Lampia dan pelayanan kapal motor BANAWA NUSANTARA ke Lokasi Wisata (Kali)	24	24	197,089,008	24.00	141,200,000	24.00	146,200,000	48.00	183,400,000	48.00	193,400,000	48.00	199,400,000	216.00	1,060,689,008	
						Jumlah kapal yang difasiltiasi pengurusan izin (1 tahun) (Unit)	150	200		25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	450.00							

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Asumsi Realisasi 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				003.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Persentase Angkutan Sungai dan Danau yang Memiliki Izin (%)		0		2.00	221,951,160	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	221,951,160	
				003.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan terhadap pelabuhan dan angkutan ASDP (Kali)				24.00	221,951,160	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	221,951,160	
				003.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah orang (L/P) / barang yang terangkut melalui dermaga ASDP (Org/Kg)	50,783.00	51,789.00	223,432,096	52,825.00	465,970,056	53,902.00	237,957,509	55,019.00	241,837,599	56,173.00	248,625,043	57,364.00	254,735,534	327,072.00	1,672,557,837	
				003.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pelabuhan yang dibangun (1				-	424,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424,000,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Asumsi Realisasi 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
						tahun) (Unit)																
						Jumlah Fasilitas Terminal Pelabuhan Yang dibangun (1 Tahun) (Unit)				1.00		- .00		- .00		- .00		- .00		1.00		
				003.13. 04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (Kegiatan)		24	201,462,040	- .00	-	24.00	179,487,453	24.00	183,367,543	24.00	190,154,987	24.00	196,265,478	120.00	950,737,501	
				003.13. 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pelabuhan yang dioperasikan / dipelihara (Unit)	3	3	21,970,056	3.00	41,970,056	3.00	58,470,056	3.00	58,470,056	3.00	58,470,056	3.00	58,470,056	18.00	297,820,336	
				3	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBAGAN	Jumlah penumpang angkutan udara (orang)	6018	6137	38,301,725											6,137.00	38,301,725	
					Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Persentase kuota penumpang umum di Bandar Udara Soroako (%)	25	25	38,301,725											25.00	38,301,725	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Asumsi Realisasi 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
					Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter (Dinas Perhubungan)	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan stake holder (kali)	12	12	38,301,725											25.00	38,301,725	
	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah (%)				100	100	4,058,725,338	100.00	4,125,473,411	100.00	4,021,849,282	100.00	4,405,391,549	100.00	4,873,640,930	100.00	4,467,265,279	100.00	25,952,345,789	
				1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	4,058,725,338	100.00	4,125,473,411	100.00	4,021,849,282	100.00	4,405,391,549	100.00	4,873,640,930	100.00	4,467,265,279	100.00	25,952,345,789	
				001.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100	100.00	72,157,035	100.00	73,015,535	100.00	73,000,000	100.00	73,000,000	100.00	74,150,000	100.00	74,150,000	100.00	439,472,570	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Asumsi Realisasi 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				001.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	2	3,846,965	2.00	3,846,965	2.00	3,900,000	2.00	3,900,000	2.00	3,950,000	2.00	3,950,000	12.00	23,393,930	
				001.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	3	16,184,975	2.00	18,854,975	2.00	19,000,000	2.00	19,000,000	2.00	19,500,000	2.00	19,500,000	13.00	112,039,950	
				001.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	10	10	48,050,311	10.00	46,238,811	10.00	46,000,000	10.00	46,000,000	10.00	46,500,000	10.00	46,500,000	60.00	279,289,122	
				001.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	2	4,074,784	2.00	4,074,784	2.00	4,100,000	2.00	4,100,000	2.00	4,200,000	2.00	4,200,000	12.00	24,749,568	
				001.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)		95.00	2,720,811,818	95.00	2,864,793,790	95.00	3,004,929,282	95.00	3,152,071,549	95.00	3,306,570,930	95.00	3,468,795,279	95.00	18,517,972,648	
				001.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan	25	25	2,658,727,8	25.00	2,802,709,847	25.00	2,942,845,339	25.00	3,089,987,606	25.00	3,244,486,987	25.00	3,406,711,3	150.00	18,145,468,99	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Asumsi Realisasi 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7		75	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
						tunjangan terbayarkan (Orang)													36		0	
				001.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	18	18	62,083,943	18.00	62,083,943	18.00	62,083,943	18.00	62,083,943	18.00	62,083,943	18.00	62,083,943	108.00	372,503,658	
				001.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)		100.00	10,451,502	10.00	10,451,502	10.00	10,500,000	10.00	10,500,000	10.00	11,000,000	10.00	11,000,000	100.00	63,903,004	
				001.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	4	4	10,451,502	4.00	10,451,502	4.00	10,500,000	4.00	10,500,000	4.00	11,000,000	4.00	11,000,000	24.00	63,903,004	
				001.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD (%)		95.00	11,112,310	95.00	11,112,310	95.00	11,200,000	95.00	11,200,000	95.00	11,500,000	95.00	11,500,000	95.00	67,624,620	
				001.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi		4	11,112,310	4.00	11,112,310	4.00	11,200,000	4.00	11,200,000	4.00	11,500,000	4.00	11,500,000	24.00	67,624,620	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Asumsi Realisasi 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
						daerah yang disusun (Dokumen)																
				001.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)		91.00	121,874,768	95.00	127,654,769	95.00	129,200,000	95.00	70,600,000	95.00	129,600,000	95.00	71,000,000	95.00	649,929,537	
				001.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	5	5.00	35,890,000	5.00	48,520,000	5.00	50,000,000	5.00	50,000,000	5.00	50,000,000	5.00	50,000,000	30.00	284,410,000	
				001.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)		12.00	20,534,768	12.00	20,534,769	12.00	20,600,000	12.00	20,600,000	12.00	21,000,000	12.00	21,000,000	72.00	124,269,537	
				001.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)		91.00	65,450,000	95.00	58,600,000	95.00	58,600,000	- .00	-	95.00	58,600,000	- .00	-	376.00	241,250,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Asumsi Realisasi 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				001.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)		95.00	623,070,170	95.00	435,417,020	95.00	447,820,000	95.00	447,820,000	95.00	483,520,000	95.00	483,520,000	95.00	2,921,167,190	
				001.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	3	3.00	20,030,000	3.00	20,030,000	3.00	20,100,000	3.00	20,100,000	3.00	20,500,000	3.00	20,500,000	3.00	121,260,000	
				001.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	150	150.00	300,863,600	150.00	361,913,600	150.00	370,000,000	150.00	370,000,000	150.00	400,000,000	150.00	400,000,000	900.00	2,202,777,200	
				001.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	2	2.00	269,551,350	2.00	30,848,200	2.00	35,000,000	2.00	35,000,000	2.00	40,000,000	2.00	40,000,000	2.00	450,399,550	
				001.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)		30.00	4,500,000	30.00	4,500,000	30.00	4,500,000	30.00	4,500,000	30.00	4,500,000	30.00	4,500,000	180.00	27,000,000	
				001.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)		8.00	4,962,220	8.00	4,962,220	8.00	5,000,000	8.00	5,000,000	8.00	5,200,000	8.00	5,200,000	48.00	30,324,440	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Asumsi Realisasi 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targe t	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				001.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	72	72.00	7,620,000	72.00	7,620,000	72.00	7,620,000	72.00	7,620,000	72.00	7,620,000	72.00	7,620,000	432.00	45,720,000	
				001.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	5	5.00	15,543,000	5.00	5,543,000	5.00	5,600,000	5.00	5,600,000	5.00	5,700,000	5.00	5,700,000	30.00	43,686,000	
				001.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)		95.00	87,142,850	95.00	274,740,000	95.00	15,000,000	95.00	310,000,000	95.00	520,000,000	95.00	10,000,000	95.00	1,216,882,850	
				001.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)		10	67,480,000	3.00	30,000,000	3.00	15,000,000	2.00	10,000,000	5.00	5,000,000	2.00	10,000,000	25.00	137,480,000	
				001.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)		9.00	19,662,850	8.00	19,740,000	- .00	-	- .00	-	5.00	15,000,000	- .00	-	22.00	54,402,850	
				001.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya				1.00	225,000,000	- .00	-	1.00	300,000,000	- .00	-	- .00	-	2.00	525,000,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Asumsi Realisasi 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
						(Unit)																
				001.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)				- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	1.00	500,000,000	- .00	- .00	1.00	500,000,000	
				001.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)		95.00	129,189,085	95.00	135,046,685	95.00	136,500,000	95.00	136,500,000	95.00	138,000,000	95.00	138,000,000	95.00	813,235,770	
				001.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	24	24.00	46,005,700	24.00	48,223,300	24.00	48,500,000	24.00	48,500,000	24.00	49,000,000	24.00	49,000,000	24.00	289,229,000	
				001.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	1200	1,200.00	28,073,385	1,200.00	28,073,385	1,200.00	29,000,000	1,200.00	29,000,000	1,200.00	29,500,000	1,200.00	29,500,000	7,200.00	173,146,770	
				001.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)		6.00	55,110,000	6.00	58,750,000	6.00	59,000,000	6.00	59,000,000	6.00	59,500,000	6.00	59,500,000	36.00	350,860,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Asumsi Realisasi 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				001.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)		95.00	282,915,800	95.00	193,241,800	95.00	193,700,000	95.00	193,700,000	95.00	199,300,000	95.00	199,300,000	95.00	1,262,157,600	
				001.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	38	38.00	15,660,000	38.00	15,660,000	38.00	15,700,000	38.00	15,700,000	38.00	15,800,000	38.00	15,800,000	38.00	94,320,000	
				001.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	8	8.00	165,800,000	7.00	115,000,000	7.00	115,000,000	7.00	115,000,000	7.00	120,000,000	7.00	120,000,000	7.00	750,800,000	
				001.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	1	1.00	38,420,000	1.00	42,920,000	1.00	43,000,000	1.00	43,000,000	1.00	43,500,000	1.00	43,500,000	1.00	254,340,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Asumsi Realisasi 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				001.09.09	Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi (Unit)	2	2.00	63,035,800	2.00	19,661,800	2.00	20,000,000	2.00	20,000,000	2.00	20,000,000	2.00	20,000,000	2.00	162,697,600	
	TOTAL								11,622,541,986		14,317,180,401		20,440,741,619		14,910,674,976		9,558,982,801		8,822,378,641		79,672,500,424	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penyusunan indikator kinerja pada RENSTRA 2021 – 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur mengacu pada tujuan dan sasaran pada RPJMD Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021 -2026. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator tersebut harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Indikator kinerja utama merupakan indikator kinerja yang dimiliki suatu organisasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Asumsi Realisasi	TARGET					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Kualitas Konektivitas Transportasi	Rasio Konektivitas Kabupaten	(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	Rasio	0.30	0.58	0.63	0.67	0.72	0.77	
2.	Meningkatnya keselamatan dan Keamanan Transportasi	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	Jumlah angkutan umum yang berijin/Jumlah angkutan umum	%	76.35	77.87	79.35	80.76	82.03	83.32	
		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	Jumlah kejadian kecelakaan angkutan tidak laik jalan tahun n/jumlah kejadian kecelakaan angkutan wajib uji tahun n	Rasio	0	0	0	0,27	0,20	0,13	

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Urusa Perhubungan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD & RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD & RKPD mengamanatkan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja Kunci (IKK) seperti pada tabel 7.2

Tabel 7.2
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

No	IKK	Rumus	satuan	Kondisi awal RPJMD 2020	Target Renstra Perangkat Daerah						Catatan Analisis
	(Indikator Kinerja Kunci)				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah.	orang	253,796	258,809	263,985	269,265	274,650	280,143	285,746	
2	Rasio ijin trayek	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan/Jumlah penduduk	%	0.011%	0.011%	0.011%	0.011%	0.011%	0.011%	0.011%	

3	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	kendaraan	2,640	2,607	2,700	2,793	2,886	2,976	3,076	
4	Jumlah pelabuhan laut/udara / terminal bus		unit	15	15	15	15	16	16	16	
5	Persentase layanan angkutan darat	Jumlah angkutan darat /Jumlah penumpang angkutan darat x (100%)	%	0.18%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	
6	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun n/Jumlah angkutan umum pada Tahun n (100%)	%	5.95%	5.93%	5.76%	5.59%	5.43%	5.27%	5.12%	
7	Pemasangan Rambu - rambu	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n / Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia (100%)	%	53.05%	53.05%	53.13%	70.50%	82.17%	93.67%	100.00%	
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Panjang Jalan/Jumlah Kendaraan	rasio	0,062	0,059	0,651	0,632	0,614	0,596	0,579	
9	Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	org, brg	392,819	400,612	408,624	416,817	425,192	433,750	442,493	
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga / bandara / terminal pertahun	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun	org,brg	392,819	400,612	408,624	416,817	425,192	433,750	442,493	

BAB VIII

PENUTUP

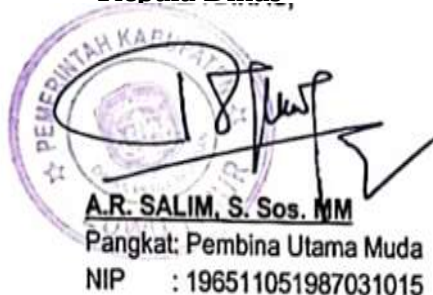
Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) Dinas Perhubungan ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan selama periode 2021-2026.

RENSTRA PD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. RENSTRA ini merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Perhubungan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan rencana tahunan Dinas Perhubungan dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

RENSTRA Dinas Perhubungan diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Bupati Luwu Timur, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Perhubungan merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Malili, Januari 2024

Kepala Dinas,



A.R. SALIM, S. Sos. MM
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 196511051987031015